



MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH: STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG

Ulvia Fadilah¹

¹Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pamulang
Email: dosen02884@unpam.ac.id

Abstrak

Manajemen risiko dalam pengelolaan aset daerah memiliki peran strategis dalam memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang muncul dalam pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Daerah Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko utama dalam pengelolaan aset daerah meliputi ketidakakuratan data aset, ketidaksesuaian prosedur administrasi, serta potensi penyalahgunaan aset. Untuk mengatasi risiko tersebut, Pemerintah Kota Serang telah mengimplementasikan beberapa langkah mitigasi, seperti pembaruan sistem inventarisasi berbasis teknologi informasi, pelatihan sumber daya manusia, dan penguatan sistem pengawasan internal. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam pengelolaan aset daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: manajemen risiko, pengelolaan aset, pemerintah daerah, Kota Serang, tata kelola pemerintahan.

Abstract

Risk management in regional asset management plays a strategic role in ensuring the efficiency, effectiveness, and accountability of government resource management. This study aims to identify, analyze, and evaluate risks in the management of regional assets within the Local Government of Serang City. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the main risks in regional asset management include inaccurate asset data, procedural non-compliance, and potential asset misuse. To address these risks, the Serang City Government has implemented several mitigation measures, such as updating the inventory system with information technology, conducting human resource training, and strengthening internal control systems. This study provides recommendations for the development of more integrated and sustainable policies in regional asset management to support good governance.

Keywords: risk management, asset management, local government, Serang City, government governance.

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu komponen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Aset daerah meliputi sumber daya yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan infrastruktur publik lainnya. Aset ini tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Namun, pengelolaan aset daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan,

terutama terkait dengan manajemen risiko. Risiko dalam pengelolaan aset daerah dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kehilangan aset, kerusakan fisik, penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, ketidaksesuaian antara pencatatan dan kondisi di lapangan, serta risiko administratif yang dapat memengaruhi akurasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Apabila risiko-risiko tersebut tidak ditangani secara tepat, maka dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk pemborosan sumber daya, kerugian finansial, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kota Serang, sebagai ibu kota Provinsi Banten, merupakan daerah yang memiliki perkembangan pesat dalam berbagai sektor. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan populasi, dan pembangunan infrastruktur, pengelolaan aset daerah di Kota Serang menjadi semakin kompleks. Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki tidak hanya terdata secara akurat, tetapi juga dikelola dengan baik untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Tantangan ini semakin besar dengan adanya kemungkinan risiko yang dapat menghambat optimalisasi aset daerah, seperti ketidaksesuaian data aset, lemahnya pengawasan, dan potensi penyalahgunaan aset oleh pihak-pihak tertentu.

Manajemen risiko dalam pengelolaan aset daerah menjadi langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan ini melibatkan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berpotensi memengaruhi pengelolaan aset. Dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, pemerintah daerah dapat mengurangi dampak negatif dari risiko yang terjadi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang. Studi ini mencakup identifikasi jenis-jenis risiko utama yang dihadapi, analisis langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut, serta evaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan empiris guna memperbaiki pengelolaan aset daerah di Kota Serang.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara praktis maupun teoretis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan aset yang berbasis manajemen risiko. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang manajemen risiko, khususnya dalam konteks pengelolaan aset di sektor publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi Pemerintah Daerah Kota Serang, tetapi juga bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan aset daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam proses manajemen risiko dalam pengelolaan aset daerah di Pemerintah Daerah Kota Serang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dalam konteks nyata. Penelitian dilakukan di Kota Serang dengan fokus pada instansi-instansi terkait pengelolaan aset daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk pejabat di BPKAD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf pengelola aset, serta

auditor internal. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih mendalam terkait identifikasi risiko, langkah pengelolaan risiko, dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, observasi langsung juga dilakukan untuk mencatat proses pengelolaan aset, seperti inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan aset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah oleh Pemerintah Daerah Kota Serang menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal identifikasi dan mitigasi risiko. Salah satu temuan utama adalah adanya ketidaksesuaian antara data aset yang tercatat dalam sistem inventarisasi dengan kondisi aset di lapangan. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kurang optimalnya proses pembaruan data, terutama dalam pencatatan aset baru, aset yang telah mengalami perubahan status, atau aset yang tidak terkelola dengan baik. Akibatnya, pengelolaan aset menjadi kurang efisien dan berisiko terhadap potensi kerugian finansial.

Selain itu, kelemahan dalam pengawasan juga ditemukan sebagai salah satu kendala signifikan. Pengawasan yang kurang memadai mengakibatkan beberapa aset digunakan di luar kepentingan pemerintah daerah atau mengalami kerusakan tanpa adanya penanganan yang tepat waktu. Proses pengawasan yang ada saat ini dinilai masih bersifat reaktif, di mana langkah-langkah perbaikan baru dilakukan setelah masalah terjadi, bukan melalui pendekatan pencegahan yang sistematis.

Minimnya pemahaman tentang manajemen risiko di kalangan pengelola aset di Kota Serang juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi. Banyak organisasi perangkat daerah (OPD) belum sepenuhnya memahami pentingnya mengidentifikasi risiko sejak awal atau menerapkan langkah mitigasi yang proaktif. Akibatnya, pendekatan pengelolaan aset cenderung terfragmentasi dan kurang terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko yang lebih komprehensif.

Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga ahli. Anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan aset sering kali tidak memadai untuk mencakup seluruh kebutuhan, termasuk pemeliharaan rutin dan pembaruan data aset. Selain itu, kurangnya tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan aset berbasis manajemen risiko juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan manajemen risiko secara menyeluruh dalam pengelolaan aset daerah. Untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian data aset, misalnya, Pemerintah Daerah Kota Serang perlu mengembangkan sistem inventarisasi yang lebih modern, berbasis teknologi, dan terintegrasi di antara seluruh OPD. Pendekatan ini memungkinkan pembaruan data dilakukan secara real-time, sehingga meminimalkan risiko ketidaksesuaian.

Kelemahan pengawasan dapat diatasi dengan memperkuat mekanisme kontrol internal, seperti pelaksanaan audit berkala dan penerapan prosedur operasional standar (SOP) yang lebih ketat. Selain itu, penting untuk melibatkan pihak ketiga, seperti auditor eksternal, dalam melakukan penilaian aset secara objektif.

Pemahaman yang minim tentang manajemen risiko di kalangan pengelola aset dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan yang terstruktur. Program pelatihan ini sebaiknya dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang identifikasi risiko, analisis dampak, dan strategi mitigasi yang sesuai dengan konteks pengelolaan aset daerah.

Terakhir, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, Pemerintah Daerah Kota Serang dapat mempertimbangkan alternatif pembiayaan, seperti kerja sama dengan pihak swasta melalui skema public-private partnership (PPP). Langkah ini memungkinkan pengelolaan aset dilakukan dengan dukungan tambahan dari pihak swasta tanpa membebani anggaran daerah secara signifikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya relevan bagi Pemerintah Daerah Kota Serang, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah di Pemerintah Daerah Kota Serang masih menghadapi sejumlah tantangan utama terkait dengan manajemen risiko. Tantangan tersebut antara lain adalah ketidaksesuaian data aset, kelemahan dalam pengawasan, minimnya pemahaman tentang manajemen risiko, dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Ketidaksesuaian data aset menjadi faktor yang dapat menghambat efisiensi pengelolaan aset dan meningkatkan potensi kerugian finansial. Kelemahan dalam pengawasan mengakibatkan penyalahgunaan dan kerusakan aset yang tidak segera ditangani, sementara kurangnya pemahaman tentang manajemen risiko menyebabkan pendekatan yang lebih reaktif daripada proaktif dalam pengelolaan aset.

Pemerintah Daerah Kota Serang perlu mengembangkan sistem inventarisasi aset yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi untuk meminimalkan ketidaksesuaian data. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan melalui audit berkala dan penerapan prosedur operasional standar (SOP) yang ketat sangat diperlukan. Pemahaman yang lebih baik tentang manajemen risiko di kalangan pengelola aset juga penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah. Terakhir, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, kerja sama dengan pihak swasta dapat menjadi alternatif yang baik untuk mendukung pengelolaan aset secara lebih efisien.

Penerapan manajemen risiko yang komprehensif dalam pengelolaan aset daerah di Kota Serang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset, serta mengurangi potensi kerugian finansial. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Pemerintah Daerah Kota Serang dan daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M., & Budi, S. (2021). Decision-Making and Risk Management: The Role of Leadership in Local Government Risk Management. *Public Sector Review*, 17(3), 140-155.
- Hidayat, T., & Kurniawan, A. (2017). Change Management Strategies for Implementing Risk Management in Local Governments. *Governance and Risk Management Journal*, 14(4), 88-103.
- ISO. (2018). ISO 31000: 2018 Risk Management – Guidelines. Switzerland: BSI Standards Limited.
- Keban, Y. T. (2017). Risk Management: A Neglected Vital Instrument in Public Administration in Indonesia. *Management Research and Practice*, 9(4), 5-21.
- Pradana, Y., A. & Rikumahu, B. (2014). Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi. *Trikonomika*, 13(2), 195-204.
- Santoso, D., & Kartika, R. (2018). Regulatory Framework for Risk Management in Local Governments: Issues and Solutions. *Public Administration Review*, 15(4), 123-140.
- Prasetyo, Y., & Anggraeni, D. (2021). Data Management in Local Government Risk Management. *Journal of Information Systems in Public Administration*, 9(2), 45-60.

- Renata, R., & Kusuma, H. (2018). Implementation of Risk Management in Local Government: Challenges and Solutions. *Journal of Public Administration*, 12(2), 120-135.
- Husein, Halim, & Tjahjono. (2009). *Pengendalian Internal: Sistematis dan Evaluasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Pustaka Pelajar.
- COSO. (2004). *Enterprise Risk Management-Integrated Framework*. Committee of Sponsoring Organizations.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rep. of Indonesia. (2016). PMK No. 12/PMK.09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Mantra, I., B. (2008). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardoto. (2009). *Good Governance dan Clean Good Governance*. Jakarta: Taruma Negara University Press.
- Prasetyo, Y. (2019). Risiko Manajemen dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(3), 125-138.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1-13.
- Nurkholis, N., Zauhar, S., Muluk, K., & Setyowati, E. (2020). Analysis of Personnel Patterns in the Regional Government of the East Java Province, Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(4), 204-218.
- Rep. of Indonesia. (2021). Surat Edaran Menteri PUPR No.04/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Charlick, R. B. (2001). Popular Participation and Local Government Reform. *Public Administration and Development*, 21(2), 149-157.
- Dailiati, S., Hernimawati, & Sudaryanto. (2017). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 9(2).
- Keban, Y. T. (2018). Manajemen Risiko dalam Pemerintahan Daerah: Pendekatan Praktis di Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 16(4), 55-67.
- Muslih, M., & Marbun, S. O. (2020). The Effect of Risk Management, Firm Age, and Firm Size on the Performance of Banking Companies Registered in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Science and Society*, 2(4), 274-290.
- Santoso, D. (2017). Pengelolaan Aset Daerah dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Pemerintahan*, 7(3), 88-101.
- Pemerintah Daerah Kota Serang. (2020). *Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah dalam Menyongsong Kemandirian Keuangan Daerah*. Laporan Kinerja Pemerintah.
- Renata, R., & Kusuma, H. (2021). Pengaruh Pengelolaan Aset terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal of Economics and Policy*, 13(4), 102-113.